

Katalog : 4102002.3319



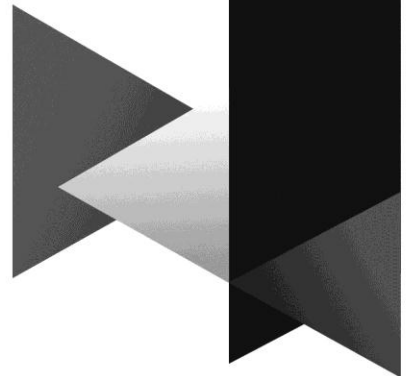
INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN
KUDUS 2017



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KUDUS



INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN
KUDUS **2017**



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN KUDUS 2017**

No Publikasi	: 33192.1701
Katalog BPS	: 4102002.3319
Jumlah Halaman	: vii + 77 halaman
Ukuran Buku	: 14.8 x 21 cm
Naskah	: Ahmad Syahdi Hamid, S.ST
Penyunting	: Ida Sofiarini, S.ST, M.M
Gambar	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi itu terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kudus Tahun 2017 memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di Kabupaten Kudus dan perbandingan dengan daerah lain di Wilayah Bakorwil Pati.

Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat, serta turut memberikan sumbangsih dalam pembangunan manusia di Kabupaten Kudus. Untuk penyempurnaan publikasi yang akan datang, kritik dan saran tetap kami harapkan.

Kudus, Oktober 2019

KEPALA BPS KABUPATEN KUDUS



Ir. Rahmadi Agus Santosa, M.Si

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Ruang Lingkup	4
1.4 Sistematika Penyusunan Analisis	4
BAB II SUMBER DATA DAN METODOLOGI	6
2.1 Pengertian Indikator	8
2.2 Indikator-Indikator Pembangunan Manusia	10
2.3 Metode Penghitungan IPM	12
2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM	19
BAB III KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL	22
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS	28
4.1 Gambaran Umum Wilayah	28
4.1.1 Kondisi Geografis	28

4.1.2 Letak Wilayah	28
4.2 Potensi Daerah	30
4.2.1 Potensi Ekonomi	30
4.2.2 Sumber Daya Manusia	36
BAB V HASIL STUDI	44
5.1 Indeks Pembanguna Manusia	44
5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia	48
5.3 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)	55
BAB VI PENUTUP	73
6.1 Kesimpulan	73
6.2 Saran Rekomendasi	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Maksimun dan Minimum Komponen IPM	21
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan	29
Tabel 4.2	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2017	32
Tabel 4.3	Jumlah Investor dan Besarnya Investasi Mandiri menurut Kecamatan Tahun 2016-2017	33
Tabel 4.4	Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2016-2017	34
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk dan Kepadatrannya Tahun 2017..	37
Tabel 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Tahun 2017	41
Tabel 4.7	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 2017	43
Tabel 5.1	Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2017	45
Tabel 5.2	Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017	46

Tabel 5.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2017	49
Tabel 5.4	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2017	53
Tabel 5.5	Angka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2017 (ribuan rupiah)	55
Tabel 5.6	Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat menurut Kecamatan Tahun 2017	57
Tabel 5.7	Banyaknya Puskesmas dan Dokter per Puskesmas menurut Kecamatan tahun 2017	58
Tabel 5.8	Banyaknya Dokter menurut Keahlian dan Kecamatan Tahun 2017	59
Tabel 5.9	Banyaknya Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya menurut Kecamatan Tahun 2017	61
Tabel 5.10	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2017	62
Tabel 5.11	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2017	63
Tabel 5.12	Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2017	64

Tabel 5.13	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2016- 2017	66
Tabel 5.14	Persentase Rumah Tangga menurut Luas lantai Per Kapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017.....	68
Tabel 5.15	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2017.....	69
Tabel 5.16	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Kudus tahun 2016 – 2017	70
Tabel 5.17	Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2017.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perubahan Metodologi IPM	19
---	----

<https://kuduskab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, seperti aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya atau meningkatkan kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Dalam wacana ekonomi pembangunan, pembangunan ekonomi identik dengan menciptakan dan mempertahankan serta meningkatkan pendapatan nasional.

Manusia adalah kekayaan bangsa. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri bukan merupakan alat dari pembangunan.

United Nations Development Programme (UNDP) telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolok ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*), rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga indikator tersebut akan saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Indeks Pembangunan Manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Selain daripada itu pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk akan tinggi pula sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Hal ini akan mempermudah untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus berorientasi pada terwujudnya Kudus yang lebih sejahtera sejalan dengan Visi dari Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu “Kudus Bangkit

Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas, dan Sejahtera”. Salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan perwujudan tujuan pembangunan jangka panjang dari suatu masyarakat, dengan meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, bukan manusia di sekeliling pembangunan.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan ini adalah menyajikan dan menganalisis data IPM yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun program pembangunan di masa mendatang maupun sebagai alat evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada masa sebelumnya. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Kudus, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Kabupaten Kudus.
- b. Memberikan gambaran permasalahan yang ada di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- a. Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi ; lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).
- b. Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
- c. Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Kudus.
- d. Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Kudus.
- e. Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan hasil analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

1.4 Sistematika Penyusunan Analisis

Sistematika penulisan analisis terdiri dari enam (6) bab, yaitu :

- BAB I Pendahuluan; berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, dan sistematika penyusunan laporan.
- BAB II Sumber Data dan Metodologi; berisi pengertian indikator-indikator pembangunan, metode penghitungan IPM, rumus dan ilustrasi penghitungan IPM dan Ukuran Perkembangan IPM.
- BAB III Konsep dan Definisi Operasional ; berisi indikator dan definisinya.

- BAB IV Gambaran Umum Kabupaten Kudus; berisi gambaran umum seputar wilayah dan potensi daerah Kabupaten Kudus.
- BAB V Hasil Studi; berisi ulasan-ulasan beserta data empiris Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Komponen Indeks Pembangunan Manusia, dan Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM).
- BAB VI Penutup; berisi kesimpulan dan saran hasil studi.

BAB II

SUMBER DATA DAN METODOLOGI

Paradigma pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun menilai dan mengukur kinerjanya selalu mengalami perkembangan dan perubahan model atau polanya. Pada dekade 60-an, paradigma yang digunakan yaitu pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*). Pada dekade 70-an pola ini berubah menjadi paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*). Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah).

Menurut UNDP (1990:1), Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“*a process of enlarging people’s choices*”). Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja;

Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara.

Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan

Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1 Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan tersebut disebut juga sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: (1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut; (2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda; (3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator; (4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan

gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e_1).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- (a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti: rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.
- (b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- (c) Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, angka harapan hidup, TPAK, dan lain-lain.

2.2 Indikator-Indikator Pembangunan Manusia

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini? Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut diatas diperlukan pula ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu kiranya dianalisis mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini sebenarnya hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk

menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan di dalam penghitungannya. Di samping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa

diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *purchasing power parity index* (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

2.3 Metode Penghitungan IPM

Untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah serta rata-rata lama sekolah ; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli) dalam rupiah.

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Suseda. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan *Human Development Report (HDR)*. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi penghitungan IPM. Kali ini perubahan drastis terjadi pada penghitungan IPM. UNDP menyebut perubahan yang dilakukan pada penghitungan IPM sebagai metode baru. Beberapa indikator diganti menjadi lebih relevan. Indikator Angka Partisipasi Kasar gabungan (*Combine Gross Enrollment Ratio*) diganti dengan indikator Harapan Lama

Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Selain itu, cara penghitungan juga ikut berubah. Metode rata-rata aritmatik diganti menjadi rata-rata geometrik untuk menghitung indeks komposit.

Perubahan yang dilakukan UNDP tidak hanya sebatas itu. Setahun kemudian, UNDP menyempurnakan penghitungan metode baru. UNDP merubah tahun dasar penghitungan PNB per kapita dari 2005 menjadi 2008. Tiga tahun berselang, UNDP melakukan penyempurnaan kembali penghitungan metode baru. Kali ini, UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik dan tahun dasar PNB per kapita. Serangkaian perubahan yang dilakukan UNDP bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

UNDP memperkenalkan penghitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara penghitungan indeks. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator AMH yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah sangat tinggi.

UNDP juga menggunakan indikator PNB per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita.

Selain indikator baru, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Untuk menghitung agregasi indeks, digunakan rata-rata geometrik (*geometric mean*). Cara penghitungan indeks yang terbilang baru ini cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014, Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain:

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

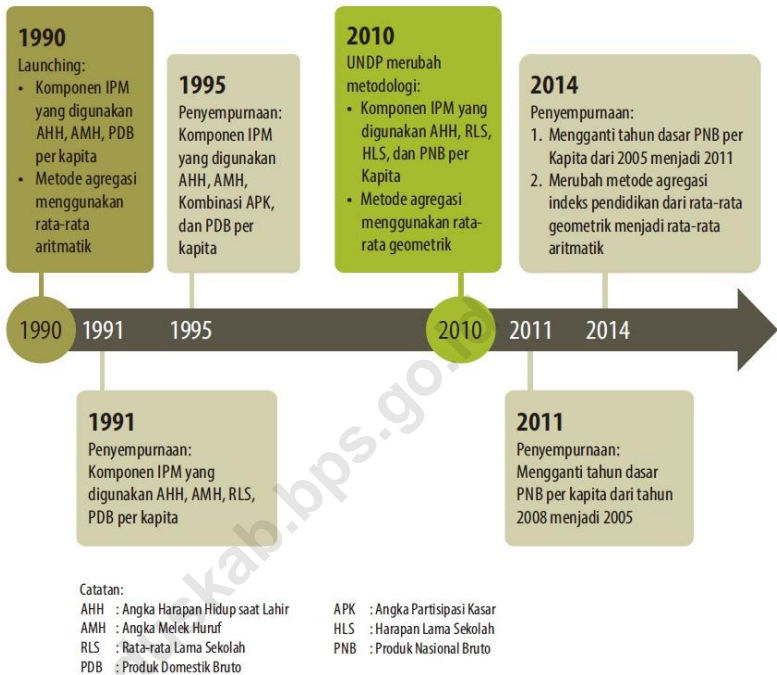
Pengeluaran per kapita yang dipakai dalam metode baru adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kita. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga

tingkat kabupaten/kota cukup memadai. Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Sedangkan indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah. Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersediaan data. Pada dasarnya, indikator PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak

perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui.

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik. Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi shortfall. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan pertumbuhan aritmatik.



Gambar 2.1 Perubahan Metodologi IPM

2.4 Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan sebagai berikut.

$$\text{Dimensi Kesehatan : } I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\min}}$$

$$\text{Dimensi Pendidikan : } I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\text{maks}} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\text{maks}} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

$$\text{Dimensi Pengeluaran : } I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Dalam menghitung IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Dalam menghitung IPM, diperlukan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator. Berikut tabel yang menyajikan nilai-nilai tersebut.

Tabel 2.1 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } I(i) = (I(i) - I(i)\text{min}) / (I(i)\text{maks} - I(i)\text{min})$$

Dimana,

$I(i)$: Indikator ke-i ($i = 1,2,3$)

$I(i)\text{maks}$: Nilai maksimum $I(i)$

$I(i)\text{min}$: Nilai minimum $I(i)$

BAB III

KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimplementasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

- **Rasio jenis kelamin** Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan** Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15 - 64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah** Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- **Angka Partisipasi Murni SD** Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD
- **Angka Partisipasi Murni SLTP** Proporsi penduduk usia 13 - 15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP

- **Angka partisipasi Murni SLTA** Proporsi penduduk usia 16 - 18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA
- **Angka Harapan Lama Sekolah** Proporsi lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas** Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- **Jumlah penduduk usia sekolah** Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun
- **Bekerja** Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja** Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun
- **Angka Pengangguran** Perbandingan penduduk yang

- Terbuka** mencari kerja terhadap angkatan kerja
- **Persentase pekerja yang setengah menganggur** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri** Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas dengan status berusaha sendiri
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap** Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap
 - **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar** Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga
 - **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis** Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya)
 - **Angka Harapan Hidup waktu lahir** Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh

- sekelompok penduduk
- **Angka Kematian Bayi** Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
 - **Persentase rumah tangga berlantai tanah** Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah
 - **Persentase rumah tangga beratap layak** Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
 - **Persentase rumah tangga berpenerangan Listrik** Proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik
 - **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding
 - **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih** Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat

- **Persentase rumah tangga berjambran dengan tangki septik** Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik
- **Pengeluaran per Kapita Disesuaikan** Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
- **Gini Rasio** Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Gini Rasio terletak antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidak merataan sempurna.
- **Penduduk Miskin** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar.

- **Garis Kemiskinan**

Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM)

<https://kuduskab.bps.go.id/>

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS

4.1 Gambaran Umum Wilayah

4.1.1 Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Kudus berada pada posisi antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 16 km dan dari utara ke selatan 22 km. Topografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah di wilayah bagian selatan dan dataran tinggi di wilayah bagian utara.

Kabupaten Kudus bercurah hujan relatif rendah, pada tahun 2017 curah hujan yang terjadi 3 244 mm/tahun dan banyaknya hari hujan 120 hari. Adapun ketinggian Kabupaten Kudus rata-rata \pm 55 m di atas permukaan laut, beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar rata-rata antara 19,7 °C sampai dengan 29,0°C, dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 72,50-77,83 persen pada tahun 2017.

4.1.2 Letak Wilayah

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak di antara empat kabupaten di Jawa Tengah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara.

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas		Jumlah Desa/Kelurahan
	Ha	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Kaliwungu	3 271	7,69	15
020 Kota	1 047	2,46	25
030 Jati	2 630	6,19	14
040 Undaan	7 177	16,88	16
050 Mejobo	3 677	8,65	11
060 Jekulo	8 292	19,50	12
070 Bae	2 332	5,49	10
080 Gebog	5 506	12,95	11
090 Dawe	8 584	20,19	18
Kabupaten Kudus	42 516	100,00	132

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 kecamatan, dengan 123 desa serta 9 kelurahan yang pada tahun 2017 terbagi menjadi 716 RW dan 3771 RT. Kabupaten Kudus merupakan daerah kabupaten paling kecil di wilayah Jawa Tengah,

yaitu dengan luas wilayah hanya 42,516 km². Kecamatan Dawe merupakan kecamatan paling luas yaitu 8,584 km² atau mencapai 20,19 persen wilayah Kabupaten Kudus, sedangkan Kecamatan Kota merupakan daerah paling kecil wilayahnya, hanya 1,047 km² atau 2,46 persen dari wilayah Kabupaten Kudus. Walaupun demikian Kecamatan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu 25 desa/kelurahan, sedangkan Kecamatan Bae hanya terdiri dari 10 desa dan merupakan kecamatan paling sedikit jumlah desanya.

4.2 Potensi Daerah

4.2.1 Potensi Ekonomi

Sektor Industri merupakan tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus dengan kontribusi sebesar 80,96 persen terhadap PDRB Kabupaten Kudus tahun 2017. Menurut BPS, sektor industri dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang, industri kecil, dan industri rumah tangga. Industri besar adalah perusahaan dengan tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 sampai 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 sampai 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 5 orang. Berdasarkan data DDA 2018, jumlah industri besar pada tahun 2015 sebanyak 88 perusahaan dan mampu

menyerap 98.012 tenaga kerja, sedangkan industri sedang berjumlah 98 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sejumlah 3.421 orang.

Dilihat dari jenis komoditi, perusahaan industri tembakau mendominasi produksi perusahaan, yaitu mencapai 35,48 persen dari total usaha industri di Kabupaten Kudus tahun 2015, diikuti industri pakaian jadi sebesar 20,43 persen, industri makanan dan minuman sebesar 8,06 persen, industri kulit dan barang dari kulit sebesar 6,99 persen, dan yang paling sedikit adalah industri pengolahan lainnya (perhiasan, alat musik, alat OR, mainan anak, dll) sebesar 0,54 persen. Sedangkan penyerapan tenaga kerja terbesar masih dari industri tembakau yaitu sebesar 76,46 persen serta kertas dan barang dari kertas sebesar 10,83 persen, diikuti industri Mesin, radio,TV, Peralatan Komunikasi dan Perlengkapannya sebesar 3,53 persen, yang paling kecil penyerapan tenaga kerja dari industri pengolahan lainnya (perhiasan, alat musik, alat OR, mainan anak, dll) sebesar 0,02 persen.

Data dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, jumlah industri besar/średang dan kecil/menengah di Kabupaten Kudus pada Tahun 2017 sebanyak 12.999 unit perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 256.098 orang tenaga kerja. Jumlah industri terbanyak terdapat di Kecamatan Kota Kudus sebesar 2.188 dengan serapan tenaga kerja sebesar 138.810 orang. Jumlah usaha industri paling kecil terdapat di Kecamatan

Undaan sebesar 487 dengan serapan tenaga kerja sebesar 2.110 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2017

Kecamatan	2016		2017	
	Industri	Tenaga Kerja	Industri	Tenaga Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Kaliwungu	1 466	39 884	1 856	14 772
020 Kota	1 931	65 904	2 188	138 810
030 Jati	1 488	36 328	1 597	28 248
040 Undaan	1 381	8 947	487	2 110
050 Mejobo	933	11 541	1 829	5 288
060 Jekulo	1 255	18 441	1 082	6 196
070 Bae	1 189	27 546	1 288	32 253
080 Gebog	1 342	26 166	1 257	21 983
090 Dawe	1 896	15 789	1 415	6 438
Kabupaten Kudus	12 881	250 546	12 999	256 098

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kab. Kudus

Besarnya kontribusi sektor industri menunjukkan bahwa sektor ini memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Kabupaten Kudus, memberi kontribusi sebesar 80,82 persen terhadap total pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Kudus. Walaupun secara geografis Kabupaten Kudus merupakan

kabupaten dengan wilayah terkecil di Jawa Tengah, namun dari sisi industri memiliki potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan.

Tabel 4.3 Jumlah Investor dan Besarnya Investasi menurut Kecamatan Tahun 2016 – 2017 (Juta Rp)

Kecamatan	2016		2017	
	Jumlah Investor	Besar Investasi	Jumlah Investor	Besar Investasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010 Kaliwungu	72	926 058,20	43	87 895,92
020 Kota	209	13 320 347,44	170	10 758 017,22
030 Jati	113	2 961 835,45	105	276 688,83
040 Undaan	40	8 230,50	16	8 992,50
050 Mejobo	43	19 224,56	37	56 518,41
060 Jekulo	51	159 035,00	35	198 103,00
070 Bae	54	897 079,46	40	45 258,05
080 Gebog	49	306 810,88	30	22 804,95
090 Dawe	33	14 387,00	24	8 825,00
Kabupaten Kudus	664	18 613 008,50	500	11 463 103,88

Sumber : Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kudus

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu tolok ukur pembangunan di suatu daerah, karena terdapat kaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pembangunan.

Tabel 4.4 Pertumbuhan PDRB dan Kontribusinya Tahun 2016 – 2017

Lapangan Usaha	2016		2017*	
	Pertumbuhan %	Kontribusi %	Pertumbuhan %	Kontribusi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,97	2,37	1,76	2,25
Pertambangan dan Penggalian	5,14	0,14	4,26	0,15
Industri Pengolahan	1,56	80,97	2,47	80,96
Pengadaan Listrik dan Gas	5,70	0,04	6,16	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,86	0,02	6,12	0,02
Konstruksi	9,01	3,29	7,53	3,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,62	5,38	6,10	5,37
Transportasi dan Pergudangan	5,79	1,03	6,19	1,02
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	1,14	6,47	1,13

Informasi dan Komunikasi	9,25	0,54	14,81	0,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,16	1,78	4,66	1,79
Real Estate	7,29	0,54	6,29	0,54
Jasa Perusahaan	9,93	0,10	8,77	0,10
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,41	0,80	2,55	0,78
Jasa Pendidikan	7,88	1,03	7,18	1,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,88	0,30	8,75	0,31
Jasa lainnya	8,52	0,52	9,13	0,53
PDRB	2,54	100	3,21	100

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2018

Di Kabupaten Kudus, sektor Industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, dimana pada tahun 2016 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,56 persen dan pada tahun 2017 menjadi 2,47 persen. Artinya pertumbuhan sektor tersebut tetap positif dan pertumbuhan tersebut lebih besar dari tahun lalu. Lapangan usaha industri pengolahan masih menempati urutan tertinggi dalam penyumbang nilai PDRB, yakni sebesar 80,96 persen dari seluruh nilai total PDRB. Sektor kedua yang memberikan kontribusi cukup besar adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor ini pada tahun 2017 memberikan sumbangan sebesar 5,37 persen lebih kecil dari tahun 2016 (5,38 persen).

Potensi ekonomi suatu daerah khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Pasar merupakan media pertemuan antara penjual dan pembeli, sehingga makin ramai transaksi terjadi berarti makin tinggi pula potensi sektor perdagangan. Jumlah pasar di Kabupaten Kudus tahun sebanyak 103 pasar, yang terdiri dari 75 pasar modern, 5 pasar daerah, 20 pasar desa dan 3 pasar hewan yang berada di Kabupaten Kudus. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah kecamatan yang ada. Kecamatan Kota Kudus menjadi kecamatan dengan jumlah pasar terbanyak yaitu 27 pasar. Sedangkan Kecamatan Dawe menjadi kecamatan dengan jumlah pasar paling sedikit dengan jumlah pasar hanya sejumlah 3 buah pasar.

4.2.2 Sumber Daya Manusia

Manusia di samping sebagai pelaku pembangunan juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Data-data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Di setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik memerlukan data kependudukan .

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tahun 2017

Kecamatan	Penduduk			Sex	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Kaliwungu	47 354	48 532	95 886	97,57	2 931
02 Kota	47 985	50 982	98 967	94,14	9 450
03 Jati	53 406	55 832	109 238	95,65	4 154
04 Undaan	37 518	38 178	75 696	98,27	1 055
05 Mejobo	37 942	38 960	76 902	97,39	2 092
06 Jekulo	53 581	55 082	108 663	97,27	1 311
07 Bae	36 184	37 257	73 441	97,12	3 149
08 Gebog	51 527	52 824	104 351	97,54	1 895
09 Dawe	53 715	54 619	108 334	98,34	1 262
Kab. Kudus	419 212	432 266	851 478	96,98	2 003

Sumber : BPS Kabupaten Kudus

Jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2017 sebanyak 851.478 jiwa, terdiri dari 419.212 laki-laki dan 432.266 perempuan, dengan sex rasio sebesar 96,98. Angka tersebut mempunyai arti bahwa di Kabupaten Kudus, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Dari 100 perempuan

hanya ada 97 laki-laki. Data menunjukkan laki-laki lebih sedikit dari perempuan merata di semua kecamatan di Kabupaten Kudus.

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, disamping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi persentase jumlah penduduknya adalah Kecamatan Jati yakni sebesar 12,83 persen dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kudus, kemudian berturut-turut Kecamatan Jekulo 12,76 persen, dan Kecamatan Dawe dengan nilai 12,72 persen. Sedangkan kecamatan

yang terkecil jumlah penduduknya adalah Kecamatan Bae sebesar 8,63 persen.

Informasi tentang distribusi penduduk secara geografis dan terkonsentrasinya penduduk di suatu tempat memungkinkan pemerintah mengatasi kepadatan penduduk, yang umumnya disertai dengan kemiskinan, dengan program pembangunan untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan atau realokasi penduduk untuk bermukim di tempat lain.

Kepadatan penduduk berkaitan dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator yang umum dipakai adalah Rasio Kepadatan Penduduk (*density ratio*) yaitu rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada tahun tertentu.

Kepadatan penduduk dari waktu ke waktu cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Tahun 2017 tercatat sebesar 2.003 jiwa setiap km². Di sisi lain penyebaran penduduk sangat tidak merata, Kecamatan Kota merupakan kecamatan yang terpadat penduduknya yaitu 9.450 jiwa per km², dan Kecamatan Undaan paling rendah kepadatan penduduknya yaitu 1.055 jiwa per km².

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan

menyongsong era globalisasi. Menurut BPS, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dari jenis kegiatannya, angkatan kerja yaitu penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif meliputi kegiatan bekerja dan yang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan untuk bukan angkatan kerja mencakup kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan berpengaruh terhadap jumlah angkatan kerja.

Penghitungan Angka Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja.

Tabel 4.6 merupakan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2017, dari tabel tersebut dapat dihitung Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Kudus yaitu sebesar 71,75 persen. Semakin tinggi nilai Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas menurut Jenis Kegiatan Tahun 2017

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	258 013	211 830	469 843
Bekerja	247 040	206 081	453 121
Menganggur	10 973	5 749	16 722
Bukan Angkatan Kerja	60 393	124 639	185 032
Sekolah	26 154	28 531	54 685
Mengurus Rumah Tangga	23 914	90 647	114 561
Lainnya	10 325	5 461	15 786
Jumlah	318 406	336 469	654 875

Sumber : BPS, Sakernas 2017

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka hasil Sakernas tahun 2017 adalah 3,56 persen. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sektor sekunder menjadi gantungan hidup sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Kudus, sekitar 51 persen yang meliputi lapangan usaha Listrik, Gas dan Air, Industri dan Konstruksi. Sektor lain sebagai gantungan hidup pekerja yang kedua adalah sektor tersier yang meliputi Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan sebesar 38 persen, kemudian yang terakhir adalah sektor primer yang meliputi Pertanian, Pertambangan dan Penggalian sebesar 11 persen.

Tabel 4.7 Penduduk 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kudus Tahun 2017

Lapangan Usaha	Tenaga Kerja	Persentase
(1)	(2)	(3)
Sektor Primer	48 702	11
Sektor Sekunder	215 269	51
Sektor Tersier	159 659	38
Jumlah	423 630	100

Sumber : BPS, Sakernas 2017

<https://kuduskab.bps.go.id/>

BAB V

HASIL STUDI

Berbagai aspek dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan, tidak saja dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap. Aspek-aspek tersebut meliputi kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses sarana dan prasarana tersebut, pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan peningkatan lapangan pekerjaan, pemerataan pendidikan yang bermutu dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM, memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah.

5.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Oleh karenanya perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi, salah satunya menggunakan set indikator pembangunan manusia, baik komposit maupun tunggal.

Secara komposit adalah dengan melihat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 5.1 Nilai IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 - 2017

Kabupaten/Kota	IPM 2016	Peringkat	IPM 2017	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	66,61	29(6)	67,52	29(6)
2. Rembang	68,60	20(5)	68,95	20(5)
3. Pati	69,03	19(4)	70,12	19(4)
4. Kudus	72,94	10(1)	73,84	9(1)
5. Jepara	70,25	16(2)	70,79	15(2)
6. Demak	70,10	18(3)	70,41	18(3)
Jawa Tengah	69,98		70,52	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil penghitungan, nilai IPM Kabupaten Kudus tahun 2017 adalah sebesar 73,84 dan berada pada peringkat 9 di Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan adanya kenaikan peringkat dibandingkan pada tahun 2016 yaitu dengan nilai IPM 72,94 yang berada peringkat 10 diantara kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pada tingkat Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah angka IPM Kabupaten Kudus berada di peringkat 1 baik pada tahun 2016 dan 2017 (lihat tabel 5.1). Secara lengkap komponen yang membentuk

IPM yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)/ e^0 , Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling (EYS)*), Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling (MYS)*) dan Pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (PPP) seperti yang ada pada tabel 5.2 di bawah ini.

Tabel 5.2 Komponen IPM Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2017

Kabupaten/Kota	(AHH)/ e^0	EYS	MYS	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	73,99	12,13	6,45	9 065
2. Rembang	74,32	12,04	6,94	9 736
3. Pati	75,80	12,29	7,08	9 813
4. Kudus	76,44	13,20	8,31	10 639
5. Jepara	75,68	12,70	7,33	9 745
6. Demak	75,27	12,54	7,47	9 544
Jawa Tengah	74,08	12,57	7,27	10 377

Sumber : Badan Pusat Statistik

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 76,44 lebih tinggi bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Tengah. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya AHH

di Kabupaten Kudus adalah telah meningkatnya kesadaran penduduk terhadap kesehatan terutama kesehatan lingkungan. Oleh karena itu program pembangunan di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, meminimalkan angka kematian ibu dan anak, penyediaan air bersih, memperbaiki sanitasi dan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Pada tahun 2017, EYS di Kabupaten Kudus sebesar 13,20. Angka ini lebih besar dibandingkan capaian EYS Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 12,57. Namun demikian pemerintah Kabupaten Kudus harus tetap memprioritaskan program wajib belajar 12 tahun yang sudah dicanangkan sebagai program unggulan daerah sehingga capaian ini dapat ditingkatkan lebih baik pada tahun mendatang.

Sejalan dengan EYS, capaian untuk Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) juga tinggi yaitu sebesar 8,31 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk di Kabupaten Kudus sudah menduduki tingkat kelas 2 SMP. Angka ini pun lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Jawa Tengah sebesar 7,27 tahun.

Rata-rata pengeluaran konsumsi riil merupakan komponen dalam penyusunan Indeks Standar Hidup. Selanjutnya dilakukan penyesuaian (*adjustment*) dengan rumus Atkinson. Berbeda dengan

komponen kesehatan dan pendidikan yang yang kontribusinya sulit diperbesar karena berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Pengeluaran riil yang disesuaikan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan penduduk sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Besaran nilai pengeluaran riil yang disesuaikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 10.639 ribu rupiah. Angka ini berada di atas angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 10.377 ribu rupiah.

Untuk dapat menghitung nilai IPM, maka besaran komponen tersebut dibuat angka indeksinya. Angka Indeks inilah yang nantinya akan dihitung dengan rata-rata geometrik untuk membentuk angka IPM.

5.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk menikmati umur panjang, sehat, dan bisa menjalankan kehidupan yang produktif. Jadi tidak mengherankan jika tolok ukur tingkat keberhasilan pembangunan salah satunya bisa dilihat dari sejauh mana nilai kualitas manusianya telah tercapai. Beberapa dimensi pengukuran kualitas hidup manusia antara lain dapat dilihat dari harapan hidup, tingkat kecerdasan dan tingkat kesejahteraan/kemakmuran. Berikut ulasan hasil studi terhadap komponen IPM di Kabupaten Kudus tahun 2017:

a. Angka Harapan Hidup (AHH/e⁰)

Banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan memperhatikan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup secara konsep adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup idealnya dihitung dari data kematian menurut kelompok umur dan dengan bantuan *life table*. Karena data kematian menurut kelompok umur belum tersedia, maka dalam studi ini dihitung dengan program *mortpack* dan sebagai inputnya adalah rata-rata jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan jumlah Anak Masih Hidup (AMH) dari hasil Susenas 2017.

Angka harapan hidup kabupaten Kudus pada tahun 2017 adalah sebesar 76,44 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya di tahun 2016.

Tabel 5.3 Angka Harapan Hidup Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016	2017
(1)	(2)	(3)
1. Blora	73,88	73,99
2. Rembang	74,27	74,32

3. Pati	75,69	75,80
4. Kudus	76,43	76,44
5. Jepara	75,67	75,68
6. Demak	75,27	75,27
Jawa Tengah	74,02	74,08

Sumber : Badan Pusat Statistik

b. Tingkat Pendidikan

Komponen tingkat pendidikan dihitung dengan dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sedangkan indikator lainnya adalah rata-rata lama sekolah (MYS), indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal.

1. Harapan Lama Sekolah (EYS)

Indikator ini merupakan salah satu indikator output bidang pendidikan yang memberikan gambaran mutu sumber daya manusia. Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk

untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 13,20 tahun pada tahun 2017 memberikan arti bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas adalah selama 13 tahun atau penduduk Kudus diharapkan bersekolah sampai perguruan tinggi pada tingkat 1. Dibanding keadaan tahun sebelumnya, angka Harapan Lama Sekolah ini mengalami sedikit kenaikan, 13,19 pada tahun 2016 menjadi 13,20 pada tahun 2017. Sedangkan posisi dengan daerah sekitar, menduduki posisi pertama di Eks Karesidenan Pati dan berada di atas angka Jawa Tengah (12,57).

2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah, sehingga belum pantas dinyatakan MYS nya. Namun dalam studi ini populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas berkaitan dengan program

wajib pendidikan dasar 9 tahun. Penghitungan MYS-nya memakai metode tidak langsung dengan memberikan bobot kepada tiap jenjang pendidikan yang ditamatkan sebagaimana dikemukakan pada Bab II.

Dari hasil studi didapatkan angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 8,31 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata rata penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP. Dari enam kabupaten pembanding, Kabupaten Kudus berada pada posisi pertama dan sudah berada diatas rata-rata Jawa Tengah. Rata-rata Jawa Tengah sebesar 7,27 tahun. Angka ini sejalan dengan hasil Susenas Jawa Tengah yang mengindikasikan masih banyak penduduk usia sekolah yang tidak/belum pernah sekolah.

Angka MYS Kabupaten Kudus dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami sedikit perubahan pada periode 2017 sebesar 8,31 naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 7,85. MYS Kudus tahun 2017 lebih tinggi dari MYS Jawa Tengah dan wilayah Bakorwil Pati. Hal ini sejalan dengan pemberlakuan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Tahun 2012 dan hal ini merupakan wujud keseriusan

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam meningkatkan kualitas masyarakat Kudus.

Tabel 5.4 Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus, Tahun 2016- 2017

Kabupaten/Kota	2016		2017	
	EYS	MYS	EYS	MYS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Blora	11,92	6,18	12,13	6,45
2. Rembang	12,03	6,93	12,04	6,94
3. Pati	11,92	6,83	12,29	7,08
4. Kudus	13,19	7,85	13,20	8,31
5. Jepara	12,28	7,32	12,70	7,33
6. Demak	12,44	7,46	12,54	7,47
Jawa Tengah	12,45	7,15	12,57	7,27

Sumber : Badan Pusat Statistik

c. Pengeluaran riil per Kapita yang disesuaikan

Pendekatan paritas daya beli merupakan pendekatan untuk penghitungan standar hidup layak, yang memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan paritas daya belinya makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar

terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Sebagai ilustrasi dapat digambarkan, apabila ada dua orang yang pendapatannya sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggal dua orang itu berbeda. Misalnya sama-sama berpendapatan 1 juta rupiah sebulan, yang satu tinggal di Kabupaten Kudus yang satu lagi tinggal di Jakarta, maka kemungkinan paritas daya belinya berbeda. Itulah sebabnya dalam penghitungan PPP dilakukan beberapa tahapan seperti dijelaskan pada Bab II.

Dari hasil penghitungan, diperoleh besarnya pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 10.639 ribu rupiah. Angka ini menunjukkan besarnya pengeluaran per kapita penduduk Kudus adalah yang terbesar diantara enam kabupaten yang tersebut di atas. Bahkan besaran pengeluaran per kapita penduduk Kudus lebih besar dari penduduk Jateng yang sebesar 10.377 ribu rupiah. Dari tabel 5.5 terlihat adanya peningkatan pengeluaran per kapita penduduk Kudus dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.5 Angka Pengeluaran per Kapita Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2016 – 2017 (ribuan rupiah)

Kabupaten/Kota	2016	2017
(1)	(2)	(3)
1. Blora	8 846	9 065
2. Rembang	9 453	9 736
3. Pati	9 548	9 813
4. Kudus	10 348	10 639
5. Jepara	9 695	9 745
6. Demak	9 377	9 544
Jawa Tengah	10 153	10 377

Sumber : Badan Pusat Statistik

5.3 Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM)

Hasil pembangunan manusia di Kabupaten Kudus selain tercermin dari indikator agregat IPM juga digambarkan dari pencapaian indikator tunggal yang terkait dengan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kudus. Indikator tunggal tersebut meliputi indikator dibidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan. Pemantauan indikator-indikator tunggal tersebut sangat bermanfaat untuk mengenali aspek-aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan IPM.

Berikut ini disajikan indikator tunggal dari beberapa sektor yang mencakup indikator input, proses, dan output sebagai indikator

pembangunan manusia. Indikator-indikator ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Kudus.

1. Kesehatan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk salah satunya adalah Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*). Aspek penting lainnya yang ikut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui Angka Kesakitan dan Rata-rata Lamanya Sakit.

Untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan peningkatan jumlah sarana dan prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Tabel 5.6 Banyaknya Pusat Kesehatan Masyarakat menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Puskes mas	Puskes mas Pembantu	Pus kes mas Perawatan	Pus kes mas Keliling	Klinik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kaliwungu	2	3	2	2	2
2	K o t a	3	3	0	3	12
3	J a t i	2	5	0	2	9
4	Undaan	2	4	1	2	4
5	Mejobo	2	4	2	2	3
6	Jekulo	2	8	2	2	4
7	B a e	2	3	0	2	5
8	Gebog	2	5	1	2	1
9	D a w e	2	6	2	2	1
	Jumlah	19	41	10	19	41

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat jumlah fasilitas pusat kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus seperti Puskesmas sebesar 19, Pukesmas pembantu sebesar 41, Puskesmas perawatan sebesar 10, Puskesmas keliling sebesar 19, dan Klinik sebesar 41 yang masing-masing tersebar di semua Kecamatan.

Tabel 5.7 Banyaknya Puskesmas dan Dokter per Puskesmas menurut Kecamatan tahun 2017

No	Kecamatan	Puskesmas	Dokter Puskesmas	Rata-Rata Dokter per Puskesmas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	2	8	4,0
2	Kota	3	7	2,3
3	Jati	2	4	2,0
4	Undaan	2	5	2,5
5	Mejobo	2	6	3,0
6	Jekulo	2	8	4,0
7	Bae	2	4	2,0
8	Gebog	2	7	3,5
9	Dawe	2	8	4,0
	Jumlah	19	57	3,0

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2018

Dari Puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus, rata-rata terdapat 2 puskesmas di tiap kecamatan, hanya ada 3 puskesmas di Kecamatan Kota Kudus dengan jumlah dokter puskesmas keseluruhan sekitar 57 dokter, dengan rata-rata dokter puskesmas per puskesmas sebesar 3 dokter.

Tabel 5.8 Banyaknya Dokter menurut Keahlian dan Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Spesialis	Umum	Gigi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kaliwungu	56	74	6
2	K o t a	22	58	7
3	J a t i	111	76	8
4	Undaan	1	16	1
5	Mejobo	1	10	1
6	Jekulo	10	15	1
7	B a e	3	5	2
8	Gebog	0	20	2
9	D a w e	0	15	2
	Jumlah	204	289	30

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2018

Selain Dokter Puskesmas terdapat dokter menurut keahlian, seperti dalam tabel 5.10 dapat dilihat terdapat dokter spesialis 204 orang, kemudian dokter umum sebesar 289 orang, dan 30 orang adalah dokter gigi, total semua dokter menurut keahlian sebanyak 523 orang yang tersebar di tiap kecamatan di Kabupaten Kudus. Jumlah dokter spesialis terbanyak ada di kecamatan Jati, diikuti kecamatan Kaliwungu, sementara kecamatan dengan jumlah dokter spesialis terbesar selanjutnya berada di kecamatan Kota.

Selain tenaga kesehatan dokter yang ada di Kabupaten Kudus, ada tenaga kesehatan lainnya yaitu perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah perawat yang ada di Kabupaten Kudus sebanyak 1.024 orang yang terbagi 987 orang perawat umum dan 37 orang perawat gigi, kemudian bidan sebanyak 599 orang yang tersebar di 9 kecamatan, kemudian tenaga kesehatan lainnya yang terdiri dari sarjana muda gizi, apoteker dan asisten apoteker yang jumlahnya sebanyak 416 orang.

Dari Tabel 5.9 terlihat bahwa jumlah perawat mengalami penurunan sedangkan jumlah tenaga kesehatan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah perawat umum terhitung 1.172 orang dan jumlah perawat gigi 37 orang pada tahun 2016. Jumlah apoteker yang terbesar ada di Kecamatan Kota Kudus yaitu sebanyak 56 orang.

Tabel 5.9 Banyaknya Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kec	Jumlah Perawat				Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya		
		Umum	PK C	PK E	Gigi		Sar mud Gizi	Apo teker	Asis ten Apo teker
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kaliwungu	194	0	0	9	109	8	24	31
2	Kota	131	0	0	4	92	13	56	48
3	Jati	454	0	0	9	148	13	34	72
4	Undaan	30	0	0	2	37	2	7	8
5	Mejobo	36	0	0	3	44	2	8	7
6	Jekulo	63	0	0	3	69	5	6	8
7	Bae	20	0	0	2	26	2	10	7
8	Gebog	24	0	0	3	30	3	12	7
9	Dawe	35	0	0	2	44	1	10	12
	Jumlah	987	0	0	37	599	49	167	200

Sumber : BPS, Kudus dalam Angka 2018

Taraf kesehatan penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti upaya kesehatan, perilaku, lingkungan, status gizi, dan juga keturunan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui taraf kesehatan penduduk adalah angka kesakitan

(*morbidity rate*). Data mengenai angka kesakitan penduduk dapat diketahui melalui pendekatan angka keluhan sakit selama satu bulan yang lalu (selama satu bulan yang berakhir satu hari sebelum survei).

Angka kesakitan merupakan rasio antara jumlah orang yang mengalami keluhan kesehatan terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Kesakitan yang dimaksud disini bukan jenis penyakit tertentu, tapi satu/beberapa jenis keluhan kesehatan karena satu jenis penyakit. Jenis keluhan ada yang dipengaruhi musim, ada juga yang sifatnya menahun.

Tabel 5.10 Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2016-2017

No	Tahun	Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	35,15	39,57	37,40
2	2017	20,75	22,34	21,56

Sumber : BPS, Susenas 2016, Susenas 2017

Untuk persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir menurut jenis kelamin di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 20,75 persen untuk laki-

laki dan 22,34 persen untuk perempuan serta total sebesar 21,56 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2016 terdapat 35,15 persen untuk laki-laki dan 39,57 persen untuk perempuan dengan total sebesar 37,40 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2016.

Rawat inap merupakan upaya penyembuhan keluhan kesehatan dengan menginap satu malam atau lebih di unit pelayanan kesehatan modern atau tradisional, termasuk dalam kejadian ini adalah rawat inap untuk persalinan. Untuk persentase penduduk yang pernah rawat inap selama setahun terakhir menurut di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebanyak 6,42 persen dimana lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki yang pernah rawat inap.

Tabel 5.11 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kudus Tahun 2017

No	Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir	2017
(1)	(2)	(3)
1	Laki-laki	5,35
2	Perempuan	7,46
	Jumlah	6,42

Sumber : BPS, Susenas 2017

2. Perumahan

Pembangunan yang berkenaan dengan tempat tinggal adalah proses yang tanpa akhir walaupun berbagai keberhasilan telah dicapai. Pada dasarnya pembangunan tempat tinggal dan lingkungan adalah kewajiban masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan bantuan dan kemudahan serta menciptakan kondisi atau iklim yang serasi untuk mendorong ke arah tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat yang mandiri secara gotong-royong.

Tabel 5.12 Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2017

No	Kecamatan	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kaliwungu	23 209	23 521
2	K o t a	24 302	24 451
3	J a t i	26 842	27 124
4	Undaan	20 462	20 754
5	Mejobo	18 465	18 729
6	Jekulo	26 513	26 841
7	B a e	17 980	18 182
8	Gebog	25 250	25 580

9	D a w e	26 849	27 184
	Jumlah	209 872	212 365

Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2016-2017

Hasil Proyeksi Penduduk tahun 2015-2016 menunjukkan bahwa banyaknya rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 tercatat sebesar 212.365 rumah tangga. Bila dibandingkan dengan angka Proyeksi Penduduk pada tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah rumah tangga sebanyak 1,19 persen.

Tempat tinggal merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia di samping sandang dan pangan. Pada saat ini tempat tinggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung tetapi fungsinya sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Bahkan rumah sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan status simbol serta juga menunjukkan identitas pemiliknya. Di Kabupaten Kudus kondisi bangunan tempat tinggal cukup beragam. Kondisi bangunan dapat dilihat dari luas lantai, jenis lantai, jenis dinding dan jenis atap.

Pada Tabel 5.13, tercatat sekitar 93,01 persen rumah tangga di Kabupaten Kudus pada tahun 2017 tinggal di rumah milik sendiri. Sedangkan yang mengontrak/sewa pada tahun 2016 sebesar 1,92 persen. Sebagian penduduk masih menempati rumah yang bebas sewa yaitu sebesar 5,07 persen. Persentase rumah tangga dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.13 Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Kudus Tahun 2016- 2017

No	Status Penguasaan Bangunan Tempat tinggal	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Milik sendiri	94,22	93,01
2	Kontrak/Sewa	0,86	1,92
3	Bebas sewa	4,52	5,07
4	Dinas	0,00	0,00
5	Lainnya	0,40	0,00
	Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2016, Susenas 2017

Kondisi bangunan lain bisa dilihat dari luas lantai rumah tangga. Luas lantai yang dimaksud dalam Susenas adalah luas lantai yang biasanya ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam penghitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).

Untuk bangunan bertingkat luas lantainya merupakan jumlah luas dari setiap tingkat yang ditempati. Luas lantai per kapita adalah luas lantai bangunan yang ditempati oleh rumah tangga dibagi

dengan jumlah anggota rumah tangga. Luas lantai hunian suatu rumah tangga berhubungan erat dengan faktor kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan anggota rumah tangga. Apabila luas lantai sempit, maka kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan anggota rumah tangga cenderung berada pada kualitas yang rendah. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah yang memiliki luas lantai minimal 50 m².

Pada tahun 2016 di Kabupaten Kudus sekitar 97,11 persen rumah tangga tinggal dalam bangunan dengan luas lantai per kapita lebih dari 7,2 m² sementara 2,89 persen rumah tangga tinggal pada bangunan dengan luas lantai per kapita kurang dari atau sama dengan 7,2 m². Kabupaten Kudus merupakan daerah industri sehingga masih ada rumah tangga atau sekelompok orang maupun perorangan yang memerlukan tempat tinggal dengan cara tinggal bersama dengan orang lain dalam satu bangunan, baik dengan cara sewa/kontrak rumah atau kamar maupun bebas sewa tanpa memerlukan lantai hunian yang luas.

Tabel 5.14 Persentase Rumah Tangga menurut Luas lantai Per Kapita di Kabupaten Kudus Tahun 2017

No	Luas Lantai Bangunan	2017
(1)	(2)	(3)
1	$\leq 7,2 \text{ m}^2$	2,89
2	$> 7,2 \text{ m}^2$	97,11
	Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2017

Indikator kondisi perumahan lain adalah kebutuhan air bersih yang layak untuk dikonsumsi . Tersedianya sumber air minum (terutama ledeng) juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga yang dianggap paling vital karena kebutuhan akan air bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Persentase rumah tangga menurut Sumber air minum menunjukkan belum meluasnya jaringan air minum yang dikelola Perusahaan Air Minum Daerah atau PDAM. Hal ini dimungkinkan karena sumber-sumber air minum belum meluas sampai ke daerah atau pedesaan. Selain itu sumber air minum yang lain seperti sumur terlindung yang masih relatif banyak, sehingga masih banyak rumah tangga yang memakai air sumur. Kemungkinan yang lain karena untuk berlangganan sumber air ledeng diperlukan biaya yang lebih besar.

Pemenuhan kebutuhan air minum dengan sumber air sumur bor/pompa mengalami kenaikan dari 22,83 persen di tahun 2016 menjadi 26,96 persen di tahun 2017. Namun untuk penggunaan leding sebagai sumber air minum mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 18,33 persen menjadi 13,51 persen di tahun 2017. Penggunaan sumber air minum tahun 2017 dari sumur sebesar 24,83 persen, dan dari mata air sebesar 2,45 persen.

Tabel 5.15 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Kudus Tahun 2016 - 2017

No	Sumber Air Minum	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Air dalam kemasan	24,86	32,25
2	Leding	18,33	13,51
3	Sumur bor/pompa	22,83	26,96
4	Sumur	31,79	24,83
5	Mata air	2,19	2,45
	Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2016, Susenas 2017

Sanitasi rumah sangat bergantung pada sistem pembuangan air besar, ini juga berkaitan erat dengan resiko kesehatan. Tempat/cara pembuangan yang kurang baik akan menyebabkan

lingkungan tempat tinggal tercemar, baik pencemaran udara maupun pencemaran sistem sanitasi rumah. Sarana pembuangan air besar yang baik seharusnya memiliki penampungan akhir yang terlindung, yaitu tersedianya tangki-tangki penampungan kotoran.

Tabel 5.16 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Kudus tahun 2016 – 2017

No	Fasilitas Tempat Buang Air Besar Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sendiri	87,64	91,02
2	Bersama	8,01	5,98
3	Lainnya (Umum dan Tidak Ada)	4,35	3,01
	Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2016, Susenas 2017

Di Kabupaten Kudus, ada sekitar 91,02 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara sendiri dan sekitar 5,98 persen memakai fasilitas tempat buang air besar secara bersama. Selain itu, persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar lainnya (umum dan tidak ada) sebesar 3,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar

penduduk di Kabupaten Kudus sudah mengetahui dan menyadari akan arti kebersihan lingkungan.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Titik berat pendidikan formal adalah peningkatan mutu pendidikan dan perluasan pendidikan dasar. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan pemerintah misalnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, perbaikan kurikulum, dan program wajib belajar 12 tahun. Dengan semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan akan semakin membaik dan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Untuk jenjang pendidikan SD berada di kelompok umur 7-12 tahun, SMP berada di kelompok

umur 13-15 tahun, dan SMA berada di kelompok umur 16-18 tahun. Semakin tinggi angka APM menandakan semakin banyak anak pada kelompok umur tertentu masih bersekolah di jenjang pendidikan sesuai kelompok umurnya.

Tabel 5.17 Angka Partisipasi Murni (APM) Formal dan Nonformal Penduduk menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2017

No	Tingkat/Jenjang Pendidikan	2017
(1)	(2)	(3)
1	SD	94,40
2	SMP	76,00
3	SMA	65,77

Sumber : BPS, Susenas 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin rendah tingkat partisipasi murni di kelompok umur tertentu.

BAB VI

PENUTUP

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah ukuran dari hasil akhir upaya pembangunan manusia, dan manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu tujuan dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menjalankan kehidupan yang produktif. Dalam perspektif pembangunan manusia adalah melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat, tidak hanya sektor ekonomi dan sosial saja akan tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

6.1 Kesimpulan

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia. Dalam kerangka demikian, pembangunan nasional sesungguhnya menempatkan manusia sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan atau menempatkan manusia sebagai titik sentral.

Selama ini seperti ada anggapan bahwa dengan adanya pembangunan ekonomi akan terjadi juga pembangunan manusianya. Kenyataannya tidak demikian, banyak daerah yang perekonomiannya maju pesat, ternyata tidak dibarengi dengan

pesatnya pembangunan manusia, walaupun memang ada korelasi positif bahwa pembangunan perekonomian sangat membantu pembangunan manusianya.

IPM Kabupaten Kudus mengalami peningkatan sejak empat tahun terakhir, pada tahun 2013 IPM Kabupaten Kudus sebesar 71,58 dan di tahun 2014 IPM Kabupaten Kudus meningkat menjadi sebesar 72,00. Di tahun berikutnya 2015 IPM Kudus sebesar 72,72, tahun 2016 meningkat menjadi 72,94 dan terus meningkat di tahun 2017 menjadi 73,84.

Keberadaan IPM memerlukan analisis situasi pembangunan manusia guna melihat indikator tunggal dari komponen-komponen pendukung IPM, yang mencakup beberapa aspek diantaranya adalah : kesehatan, pendidikan, perekonomian, ketenagakerjaan, dan perumahan. Dari komponen kesehatan diperoleh angka yang mengindikasikan peningkatan angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Kudus pada tahun 2017 adalah sebesar 76,44 meningkat jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya di tahun 2016. Untuk mempercepat peningkatan nilai IPM diperlukan pendukung khususnya untuk Angka Harapan Hidup.

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Kudus sebesar 13,20 pada tahun 2017 memberikan arti bahwa lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas adalah selama 13 tahun atau penduduk Kudus

diharapkan bersekolah sampai perguruan tinggi kelas 1. Untuk angka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kudus pada tahun 2017 sebesar 8,31 tahun. Bila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan secara rata rata penduduk Kabupaten Kudus belum tamat SLTP (dimana rata-rata sekolah normal sekitar 9 tahun). Besaran pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Kudus tahun 2017 sebesar 10.639 ribu rupiah. Tertinggi diantara kabupaten sekitarnya dan melebihi angka pengeluaran per kapita penduduk di Jawa Tengah.

Tempat tinggal yang ideal tentunya dalam kondisi yang baik, cukup luas, terbuat dari bahan-bahan bangunan yang bermutu baik dan memenuhi syarat kesehatan. Kondisi tempat tinggal dan fasilitas pokok perumahan secara umum di Kabupaten Kudus menunjukkan perbaikan kualitas, tetapi kondisi yang telah dicapai masih perlu peningkatan, karena masih tertinggal dengan beberapa daerah perkotaan lainnya di Jawa Tengah.

6.2 Saran Rekomendasi

Untuk meningkatkan IPM memerlukan upaya peningkatan komponen komponen pendukung IPM (kesehatan, pendidikan dan perekonomian). Peningkatan Anggaran pendidikan dan kesehatan di APBD baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk peningkatan akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan dan program wajib belajar 12 tahun.

Di bidang kesehatan dengan meningkatkan pemerataan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh swasta diharapkan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang meningkat terutama bagi penduduk miskin dan keluarga dengan bayi, balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan usia lanjut akan mampu memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan yang ada.

Peningkatan bidang pendidikan memerlukan penanganan tersendiri. Meskipun capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf Kabupaten Kudus tergolong tinggi, namun masih dijumpai penduduk berusia sekolah yang belum/tidak sekolah dan juga yang sudah tidak bersekolah lagi (hanya lulus SD atau *drop out*). Selain dari segi kuantitas, perlu juga meningkatkan mutu pendidikan dari kualitasnya. Kualitas pendidikan yang baik akan memunculkan generasi-generasi muda yang cerdas, terampil dan bertaqwa sehingga kualitas hidup masyarakat mendatang akan semakin baik.

Peningkatan efisiensi dan efektifitas program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia dengan membentuk lembaga yang berfungsi melakukan koordinasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan manusia lintas sektor. Perlu ditumbuhkembangkan kegiatan-

kegiatan ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk, terutama penduduk miskin, yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kemauannya oleh dinas/instansi yang membina pengusaha mikro, kecil menengah dan koperasi.

<https://kuduskab.bps.go.id>